

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Karakteristik negara hukum terlihat jelas dengan adanya ketegasan pemisahan kekuasaan, yang terdiri dari Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, sehingga terlihat bahwa pemerintahan dijalankan dengan hukum dan bukan oleh perorangan/ penguasa.

Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan penegakan/perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, diperlukan ketaatan terhadap peraturan dalam berkehidupan sehari-hari. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan hubungan Masyarakat sehari-hari di negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan pada kekuasaan, sehingga dengan demikian, keadilan, kebenaran, ketertiban hukum, kepastian hukum serta ketertiban penyelenggaraan sistem hukum merupakan perihal pokok yang harus dilaksanakan untuk menjamin kehidupan Masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Sejalan dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maka Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas

dan tanggungjawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera serta ikut secara aktif memelihara perdamaian dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi tiap-tiap Warga Negara dari setiap ancaman atau tindakan *desdruktif* (pengrusakan) baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia adalah Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara. Cabang-cabang hukum tersebut dibedakan dalam hukum materiil dan hukum formil. Penegakan hukum materiil, termasuk didalamnya hukum pidana materiil, diperlukan adanya hukum pidana formil atau Hukum Acara Pidana.<sup>1</sup> Hukum Acara Pidana mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum pidana, mulai dari timbulnya persangkaan adanya suatu perbuatan pidana (tindak pidana) sampai dengan pelaksanaan putusan.

Tujuan dari hukum acara pidana yang tersusun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP), adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah Pelaku yang dapat didakwa

---

<sup>1</sup>R. Soehadi, "*Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*", APOLLO, Surabaya, 1995, hal 173.

melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya dilakukan penahanan.<sup>2</sup> Sedangkan dalam pemeriksaan dan putusan di Pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah Orang yang didakwa itu bisa dipersalahkan.

Usaha-usaha untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf d KUHAP, Penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Penangkapan dimaksud adalah untuk mempermudah pelaksanaan penyidikan.

Penyidik menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, KUHAP mengenal dua golongan Penyidik, yaitu Penyidik Polri dan Penyidik PNS.

Berkaitan dengan hal tersebut, disebutkan dalam Pasal 1 angka (20) KUHAP bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penangkapan diatur dalam Pasal 18 KUHAP yang menyatakan bahwa :

---

<sup>2</sup>Andi Tahir Hamid, "*Hukum Acara Pidana Umum dan Hukum Acara Pidana Khusus*", CV Al Ihsan, Surabaya, 1989, hal 3.

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana, penyidik harus memiliki cukup bukti, baik mengenai unsur tindak pidana yang dipersangkakan maupun mengenai identitas seseorang yang disangka tersebut. Namun dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses penangkapan terjadi salah tangkap. Terjadinya salah tangkap oleh Penyidik Polri, dalam istilah hukum disebut dengan *error in persona* yang artinya kekeliruan atau kekhilafan mengenai orangnya.<sup>3</sup>

Korban salah tangkap memiliki suatu kerugian yang harus segera dilakukan penanganan, khususnya pada kerugian immateriil. Kerugian yang utama adalah terkait tercemarnya nama baik Mereka oleh stigma negatif dari Masyarakat sekitar. Kompensasi yang diberikan oleh Negara terhadap Korban salah tangkap yang berbentuk materiil, belum cukup untuk mengembalikan nama baik Mereka.

Ironisnya adalah ketika stigma negative terhadap Mereka tersebut terjadi, bukan

---

<sup>3</sup>Sударsono, “*Kamus Hukum, Edisi Baru*”, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 119.



hanya hak kemerdekaannya saja yang hilang, namun hak untuk bersosial pun juga tertindas, sehingga disamping adanya tuntutan ganti rugi kepada Negara, maka juga dibutuhkan rehabilitasi terhadap Korban salah tangkap.

Tugas pokok Kepolisian berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2002) adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat;
- b. Menegakan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, terjadinya *error in persona* oleh Penyidik tentunya menjadikan sebagian Masyarakat merasa takut dan tidak nyaman apabila suatu saat Mereka menjadi korban *error in persona*, termasuk bagi Masyarakat Kabupaten Kudus. Selain itu, tugas dari Kepolisian yang tercantum pada Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tidak berjalan secara efektif karena yang seharusnya Aparat Kepolisian memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, justru akan menimbulkan keresahan di Masyarakat apabila ada kasus salah tangkap.

Salah satu contoh kasus salah tangkap (*Error in Persona*) di Indonesia adalah di wilayah Polres Kudus, Kudus, Jawa Tengah. Adapun upaya Praperadilan dari kasus salah tangkap (*Error in Persona*) dalam tindak pidana umum di wilayah Pengadilan Negeri Kudus, pernah terjadi pada tahun 2013, 2014 dan 2018. Data tersebut, telah dihimpun sebagai berikut :

Instansi	2013	2014	2018
Polres Kudus	-	1	1
Polsek Kota	-	-	-
Polsek Mejobo	-	-	-
Polsek Bae	-	-	-
Polsek Dawe	-	-	-
Polsek Gebog	-	-	-
Polsek Kaliwungu	-	-	-
Polsek Undaan	-	-	-
Polsek Jati	1	-	-
Polsek Jekulo	-	-	-

*Sumber : Data Pengadilan Negeri Kelas I B Kudus.*

Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk Wilayah Polres Kudus pada tahun 2013, 2014 dan 2018 terdapat 3 kasus salah tangkap (*Error in Persona*), yaitu terjadi di Polres Kudus, Polsek Jati, Polsek Gebog.

Pada kasus salah tangkap (*Error in Persona*) di wilayah Polres Kudus, Penulis mengambil 4 sampel yang berkaitan dengan tindak pidana umum, yakni pada instansi Polres Kudus, Polsek Jati dan Polsek Gebog. Masing-masing kasus yang disangkakan adalah :

Instansi	Nama Korban Salah Tangkap	Tindak Pidana
Polres Kudus	Bapak Kuswanto	Perampokan
Polsek Jati	Bapak Danang Amirullah	Pemerasan
Polsek Gebog	Bapak Muamar	Pengeroyokan

Kasus *error in persona* merupakan kesalahan yang tidak bisa lepas dari proses Penyidikan oleh pihak Kepolisian. Penyidik dari tingkat Polres maupun Polsek di Kabupaten Kudus telah mengantisipasi adanya kejadian tersebut. Namun, meskipun begitu tetap saja pernah terjadi *error in persona* pada tahap Penyidikan di Wilayah Polres Kudus.

Berdasarkan pada kasus *error in persona* pada tahap Penyidikan, sudah seharusnya Korban melakukan upaya hukum pada proses Praperadilan. Namun, pada realitanya masih ada Korban salah tangkap yang justru tidak paham terkait hak-haknya apabila Mereka ditangkap tanpa adanya alasan hukum yang mengaturnya. Menurut AKP Muhaimin selaku Kepala Polsek Gebog, pernah ada kejadian salah tangkap (*Error in Persona*) di Polsek Gebog sebelum kepemimpinannya, yakni pada kasus pengeroyokan. Namun, ketika dalam proses Penyidikan salah satu dari orang yang diduga Pelaku Pengeroyokan tersebut tidak terbukti terlibat dalam kasus pengeroyokan. Bahkan, Korban salah tangkap tersebut sama sekali tidak mengajukan upaya hukum Praperadilan untuk menuntut hak-haknya. Lebih lanjut, AKP Muhaimin mengatakan apabila

kedepannya terjadi salah tangkap di Polsek Gebog, maka pihaknya siap untuk menerima tuntutan Praperadilan dari Korban salah tangkap.<sup>4</sup>

Selain itu, pada tahun 2011, pernah ada kasus salah tangkap di Polres Kudus. Korban yang bernama Kuswanto, warga desa Jepang, Kecamatan Mejobo, dianiaya sampai mengalami luka bakar oleh oknum Polisi Polres Kudus. Kuswanto dipaksa untuk mengaku atas tuduhan perampokan di sebuah toko es krim di Kabupaten Kudus. Namun, pada kasus tersebut Kuswanto sudah mengajukan upaya Praperadilan untuk menuntut hak-haknya.

Upaya untuk menuntut kembali hak Korban salah tangkap adalah melalui proses Praperadilan. Berdasarkan Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP, pengajuan Praperadilan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penyidikan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Berkaitan dengan pemberian kompensasi ataupun ganti rugi terhadap Korban salah tangkap, telah diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut PP No. 27

---

<sup>4</sup> AKP Muhaimin, *Hasil Wawancara*, Kapolsek Gebog Kudus, November 2018.



Tahun 1983), mengatur adanya ganti kerugian yang diberikan kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, Penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang “Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Korban Salah Tangkap (*Error in Persona*) dalam Tindak Pidana Umum di Wilayah Polres Kudus”. Penulis tidak menafikan bahwa dalam pengambilan judul yang demikian banyak ditemukan di bahan skripsi lain. Namun, perbedaan dari skripsi ini adalah dengan menggunakan tindak pidana umum sebagai obyeknya. Hal tersebut dikarenakan bahwa alasan obyektifnya, yakni di wilayah Polres Kudus, pernah terjadi kasus salah tangkap, dimana tindak pidana yang disangkakan adalah tindak pidana umum.

## **B. PERUMUSAN MASALAH :**

Pembahasan dalam skripsi Penulis yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*) dalam Tindak Pidana Umum di Wilayah Polres Kudus” akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Perlindungan Hukum terhadap hak-hak Korban salah tangkap (*Error in Persona*) dalam Tindak Pidana Umum di Wilayah Polres Kudus?

2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian di Wilayah Polres Kudus untuk meminimalisir terjadinya salah tangkap (*Error in Persona*) dalam proses Penyidikan?

### **C. TUJUAN PENELITIAN :**

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami dan menganalisis Implementasi Perlindungan Hukum terhadap hak-hak Korban salah tangkap (*Error in Persona*) dalam Tindak Pidana Umum di Wilayah Polres Kudus.
2. Memahami dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian di Wilayah Polres Kudus untuk meminimalisir terjadinya salah tangkap (*Error in Persona*) dalam proses Penyidikan.

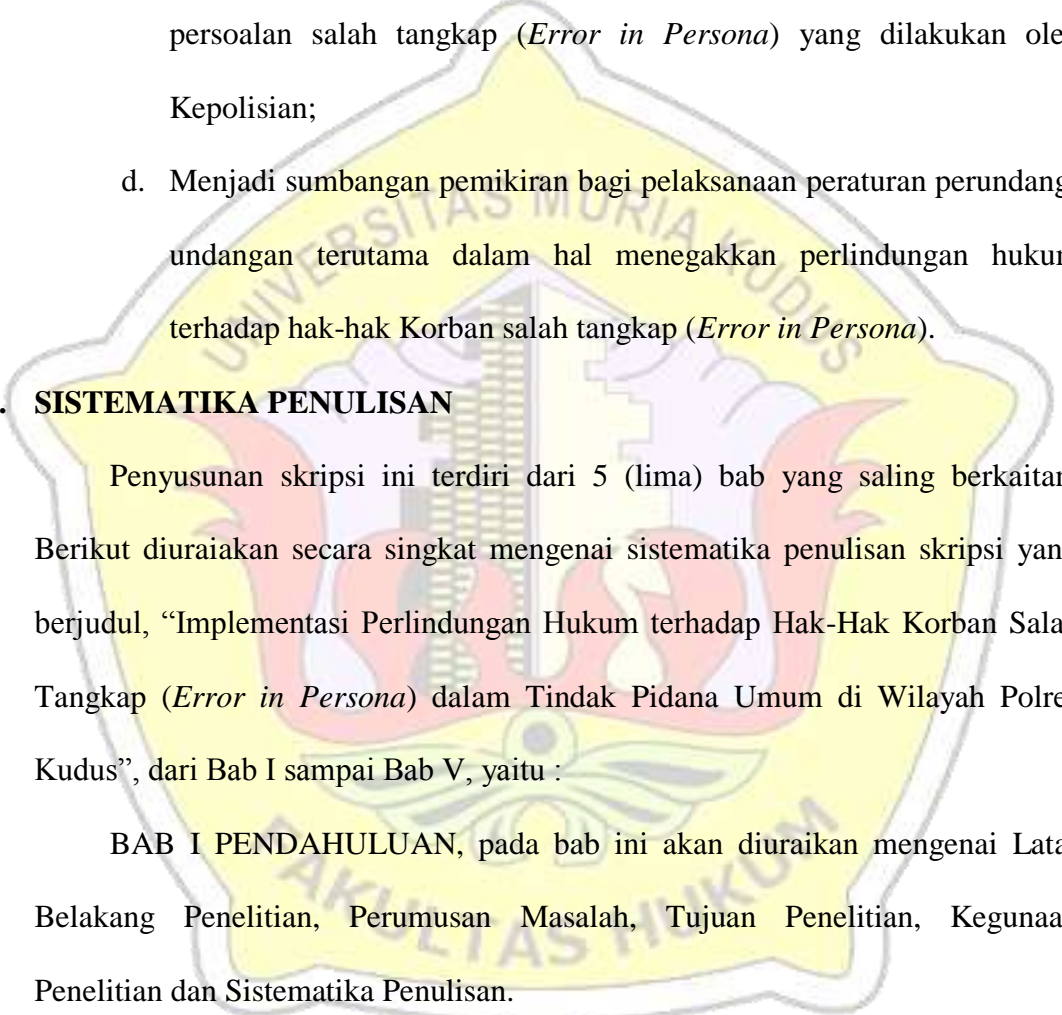
### **D. KEGUNAAN PENELITIAN :**

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis pada penelitian ini adalah, bahwa hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang masalah yang terjadi dalam implementasi Perlindungan Hukum terhadap hak-hak Korban salah tangkap (*Error in Persona*) dalam Tindak Pidana Umum di Wilayah Polres Kudus.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis pada penelitian ini adalah :

- 
- a. Untuk menambah bahan kepustakaan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana;
  - b. Untuk menambah wawasan masyarakat pencari keadilan;
  - c. Untuk dijadikan bahan masukan bagi mereka yang sedang mengalami persoalan salah tangkap (*Error in Persona*) yang dilakukan oleh Kepolisian;
  - d. Menjadi sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan peraturan perundang-undangan terutama dalam hal menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak Korban salah tangkap (*Error in Persona*).

#### **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan. Berikut diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi yang berjudul, “Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Korban Salah Tangkap (*Error in Persona*) dalam Tindak Pidana Umum di Wilayah Polres Kudus”, dari Bab I sampai Bab V, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini akan dijelaskan mengenai kajian teoritis yang berhubungan dengan skripsi ini dan menjadi acuan dalam pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, yang terdiri dari

Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Umum serta Hak-Hak Korban Salah Tangkap.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini menjelaskan terkait Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Penyajian Data dan Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun, yaitu meliputi, Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Korban Salah Tangkap (*Error in Persona*) dalam Tindak Pidana Umum di Wilayah Polres Kudus dan Upaya Kepolisian untuk Meminimalisir Kasus Salah Tangkap (*Error in Persona*) dalam Proses Penyidikan.

BAB V PENUTUP, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dari jawaban rumusan permasalahan skripsi ini dan saran yang dapat diberikan Penulis dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

